

**IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM
PENANGGULANGAN KEKERASAN PADA ANAK
(Studi pada SD N 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu)**

(Skripsi)

Oleh

AYU KARTIKA SARI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2017**

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CHILD FRIENDLY SCHOOLS PROGRAMME IN TACKLING VIOLENCE IN CHILDREN (Studies in Pringsewu Regency SDN Panggungrejo 3)

By

Ayu Kartika Sari

Every child needs to get a chance to grow and develop optimally, both physical, mental and social. State Minister for Women Empowerment and Child Friendly Issued Ministerial Regulation No. 8 2014 About Child Friendly School Policy, namely a school able to ensure and fulfill the rights of the child to provide protection of children from violence in education environments. This research aims to find out how is the Child Friendly Schools programme implementation in Pringsewu Regency SDN Panggungrejo 3 and the factors that affect the program. Institutions that become Child Friendly Schools programme implementor is a local NGO called Children and the Community Observer Agency (L-PAMAS).

This research uses descriptive research methods with qualitative approach as well as using the implementation model with a bottom up approach advanced by Richard Elmore. Based on the research that has been done, the implementation of child friendly school programme at SDN Panggungrejo 3 has done good enough. In the implementation of this programme, the main actors involved, among others, L-PAMAS, SDN Panggungrejo 3, Department of education and culture of the Pringsewu, the village government and Panggungrejo village community. The process of implementation and activities on child friendly school programme was in line with the policy objectives as well as reference and are based on the regulations of the Minister for women's empowerment and child protection No. 8 2014 About child friendly school policy.

Keywords: Program Implementation, Public Policy, Child Friendly Schools

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN PADA ANAK (Studi pada SDN 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu)

Oleh

Ayu Kartika Sari

Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Peraturan Menteri No 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, yaitu sekolah yang mampu menjamin dan memenuhi hak-hak anak untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi program Sekolah Ramah Anak di SDN 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu dan faktor-faktor yang mempengaruhi program. Lembaga yang menjadi implementor program Sekolah Ramah Anak merupakan LSM lokal bernama Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat (L-PAMAS).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan model implementasi dengan pendekatan *bottom up* yang dikemukakan oleh Richard Elmore. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, implementasi program Sekolah Ramah Anak di SDN 3 Panggungrejo telah terlaksana cukup baik. Dalam implementasi program ini, aktor-aktor utama yang terlibat antara lain L-PAMAS, SDN 3 Panggungrejo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, pemerintah desa dan masyarakat desa Panggungrejo. Proses implementasi dan kegiatan pada program Sekolah Ramah Anak telah sejalan dengan tujuan kebijakan serta mengacu dan berpedoman pada Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

Kata Kunci: Implementasi program, Kebijakan publik, Sekolah Ramah Anak

**IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM
PENANGGULANGAN KEKERASAN PADA ANAK
(Studi pada SD N 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu)**

Oleh

AYU KARTIKA SARI

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN PADA ANAK**
(Studi pada SD N 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu)

Nama Mahasiswa : **Ayu Kartika Sari**

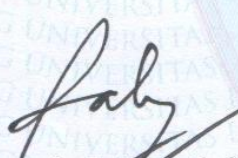
No. Pokok Mahasiswa : 1316041011

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

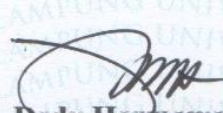


1. Komisi Pembimbing


Rahayu Sulistiwati, S.Sos., M.Si.
NIP 19710122 199512 2 001

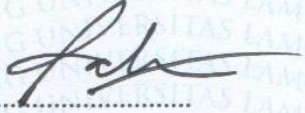

Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A.
NIP

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.** 

Sekretaris : **Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A.** 

Penguji Utama : **Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.** 

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 Juli 2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 05 Juli 2017

Yang membuat pernyataan



Ayu Kartika Sari
NPM. 1316041011

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ayu Kartika Sari. Lahir di Tanjung Karang pada tanggal 28 Agustus 1995, sebagai putri dari pasangan Drs. Murdoko (alm) dan Mulyana. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara.

Penulis mengawali pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Intan Pertiwi pada tahun 2000-2001, Sekolah Dasar Negeri 1 Rawas pada tahun 2001-2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Pesisir Tengah dan lulus pada tahun 2010. Setelah itu, penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pesisir Tengah serta lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013, penulis diterima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan dan organisasi kampus. Penulis pada tahun 2013 tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni (UKMBS) Universitas Lampung dan sempat menjabat sebagai Staff Inventaris periode tahun 2014-2015. Selain itu, pada periode tahun 2016, penulis dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni Universitas Lampung. Ketertarikan penulis dalam berorganisasi khususnya pada bidang seni terbukti dengan beberapa kegiatan penulis antara lain:

1. Pada tahun 2014, penulis mengikuti Pekan Seni Mahasiswa Daerah Provinsi Lampung untuk tangkai lomba penulisan cerpen.
2. Pada tahun 2015, penulis menjadi pemeran utama dalam lakon teater "*Bila Malam Bertambah Malam*" karya Putu Wijaya yang dipentaskan dalam Hajatan Teater 2015.
3. Pada tahun 2015 penulis menjadi *stage manager* pada pementasan monolog yang dipentaskan di Festival Teater Mahasiswa Nasional (STIGMA IV) di Palembang.
4. Pada tahun 2016, penulis menjadi *official* tim Lampung pada Pekan Seni Mahasiswa Nasional (PEKSIMINAS) di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Sebagai bentuk pengabdian penulis kepada masyarakat dan sekaligus sebagai kewajiban studi, pada Januari sampai Maret 2016, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di desa Tebakak, Kabupaten Pesisir Barat.

MOTTO

Bukan gunung di depanmu yang membuatmu menyerah, tapi
kerikil yang ada dalam sepatumu.

(Muhammad Ali)

"pendidikan hanya sebagian yang diperlukan hidup. Hal
lainnya adalah integritas, kejujuran, disiplin dan
kesungguhan"

(Susi Pudjiastuti)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT
Dengan segala kerendahan hati kuucapkan syukur atas
karuniamu
kupersembahkan karya kecil ini teruntuk yang tercinta

Papa (alm) dan mama yang telah memberikan segenap kasih
dan sayangnya

Kakak, abang, dan ponakan kecilku yang selalu
menyemangati terimakasih untuk segala pengorbanan dan
telah menjadi malaikat dalam hidupku

Keluarga besar UKMBS Unila, yang telah memberi warna
warni masa mudaku

Serta teruntuk yang terkasih, terimakasih telah menemani
menuju pendewasaan diri

Para pendidik, guruku dari jenjang sekolah dasar sampai
perkuliahan, sahabat, teman-teman dan almamaterku
tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillaahirrahmaannirahiim

Alhamdulillahirabil'alamins segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Penanggulangan Kekerasan Pada Anak (Studi pada SDN 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu)”. Skripsi ini ditulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis dengan segala kerendahan hati, sangat menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan penulis. terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang baik secara moril maupun materiil telah membantu. Oleh karenanya, dengan hati yang setulus-tulusnya Penulis mengucapkan terima kasih Kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menciptakan siang dan malam yang selalu mengiringi hidup penulis, dan Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi suri tauladan dan inspirasi dalam kehidupan penulis.
2. Mama tercinta, terimakasih telah menjadi sosok perempuan yang luar biasa. Almarhum papa, terimakasih telah menjadi sosok ayah hingga hayat

menjemput. Dan untuk kakak, abang, mbak, serta ponakanku, terimakasih untuk waktu, semangat, pengorbanan dan cinta kasihnya.

3. Bapak Drs. Syarief Makhya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara sekaligus menjadi Dosen Pembahas penulis, yang selalu bersedia memberikan kritik, saran dan masukannya yang membangun kepada penulis.
5. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si dan Ibu Selvi Diana Meilinda, S.A.N.,MPA selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga, arahan dan masukannya dengan sabar kepada penulis dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi. Terimakasih telah menjadi dosen pembimbing yang menyenangkan.
6. Bapak Dr. Bambang Utoyo, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, serta seluruh dosen dan staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila, terimakasih telah memberikan ilmu selama ini, semoga akan ternilai menjadi amal jariyah sebagai ilmu yang bermanfaat.
7. Untuk seluruh informan dalam penelitian ini, seluruh pihak L-PAMAS, LPA, Pemerintah Desa Panggungrejo dan SDN 3 Panggungrejo, terimakasih untuk waktu dan bantuannya selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Terimakasih untuk kanda dan yunda Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA), terimakasih kawan-kawan seperjuangan Alasmenara, keluarga saya di Unit Kegiatan Mahasiswa

Bidang Seni (UKMBS) Unila, serta rekan-rekan lintas jurusan yang telah banyak memberikan warna selama masa perkuliahan.

9. Terimakasih untuk semua yang saya rasa kita punya kedekatan tersendiri, Kurnia Dwi Permata Sari, Irnawati, Dita Meinurisa, wo Nevia Setiana, mba Nice Radianse, mba Qorri Hidayati, bang Rio Wirawan, Beni Elyasari, Muthia Tazakka, Rahma Dyan, Suci Andayani, Yuyus Firmansyah, M Faridl Masda, Reza Fadlie, Cahya Ayu, Siska Ranida, Chandra Aria, Rhirik, Warih, Sejuk Prianto, Edo Pratama, bang Daniel, bang Yandi, Dina Romayanti, Agnes Wahyu, Vania Cristine Silalahi, Sinta Dewi O, alin, iyar, vivi dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih untuk canda, tawa, air mata kerja keras dan bantuannya selama ini.
10. Keluarga KKN Desa Tebakak, Monica, Viola, Ijal, Amel, Anas, dan Ambos terimakasih telah menjadi partner selama 60 hari bersama.
11. Terimakasih untuk setiap cinta yang datang dan pergi, dan yang sampai saat ini masih setia menemani.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulis secara pribadi maupun mereka yang telah menyediakan waktu membacanya.

Bandar Lampung, 13 Juli 2017

Penulis,

Ayu Kartika Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB IPEDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Mengenai Kebijakan Publik	10
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	10
2. Ciri-ciri Kebijakan Publik.....	11
3. Tahapan Kebijakan Publik	11
B. Tinjauan Implementasi Kebijakan Publik	13
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	13
2. Model Implementasi Kebijakan	14
2.1 Model Van Meter dan Van Horn	15
2.2 Model Edwards III.....	17
2.3 Model Mazmanian dan Sabatier.....	18
2.4 Model Marilee S. Grindle	19
2.5 Model Hoogwood dan Gun.....	20
2.6 Model Goggin dkk	20
2.7 Model Richard Elmore dkk.....	21
C. Tipe Kekerasan Terhadap Anak.....	26
D. Kerangka Pikir Penelitian	27
BAB IIIMETODE PENELITIAN	
A. Tipedan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Fokus Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Informan Penelitian	33
E. Sumber Data	34
F. TeknikPengumpulan Data.....	35
G. TeknikAnalisisData.....	36

H. Teknik Keabsahan Data	37
--------------------------------	----

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sekolah Ramah Anak	40
1. Pengertian Sekolah Ramah Anak.....	40
2. Maksud dan Tujuan Kebijakan Sekolah Ramah Anak	40
3. Landasan Hukum Kebijakan Sekolah Ramah Anak	41
4. Prinsip Sekolah Ramah Anak	43
5. Tahapan Sekolah Ramah Anak	44
B. Gambaran Umum Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat (L-PAMAS)	48
C. Gambaran Umum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu.....	49
D. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu.....	51
E. Gambaran Umum Desa Panggungrejo.....	52

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	54
1. Implementasi Program SRA Dalam Penanggulangan Kekerasan Pada Anak di SDN 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu	54
a. Persiapan Program SRA di SDN 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu	56
b. Perencanaan Program SRA di SDN 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu	60
1) <i>Workshop</i> Manajemen SDM Berbasis Kinerja.....	62
2) <i>Workshop</i> Peningkatan Kompetensi Kepribadian dan Sosial Guru	64
3) <i>Workshop</i> Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum.....	65
4) <i>Workshop</i> PAIKEM Terintegrasi dengan Lingkungan Hidup	67
5) <i>Workshop</i> Pemberdayaan Komite Sekolah dan Masyarakat ..	69
6) <i>Workshop</i> Penyusunan Profil Sekolah.....	70
c. Pelaksanaan Program SRA di SDN 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu	73
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SDN 3 Panggungrejo.....	99
B. Pembahasan.....	102
1. Implementasi Program SRA Dalam Penanggulangan Kekerasan Pada Anak di SDN 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu	102
a. Persiapan Program SRA di SDN 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu	102
b. Perencanaan Program SRA di SDN 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu	107
c. Pelaksanaan Program SRA di SDN 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu	111
2. Faktor yang Mempengaruhi Program SRA.....	117

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Informan	33
2. Daftar Data Sekunder	35
3. Luas Daerah, Jumlah Kecamatan, Desa dan Penduduk Menurut Kecamatan.....	52
4. Kondisi Proses dan Pelaksanaan Pembelajaran	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn.....	16
2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Edward III	18
3. Kerangka Pikir	29
4. Kegiatan <i>Workshop</i> Manajemen SDM Berbasis Kinerja.....	63
5. Kegiatan <i>Workshop</i> Peningkatan Kompetensi Kepribadian dan Sosial Guru.....	65
6. Kegiatan <i>Workshop</i> Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum	66
7. Kegiatan <i>Workshop</i> PAIKEM Terintegrasi Dengan Lingkungan Hidup.....	68
8. Kegiatan Gotong Royong Hasil Nyata Dari Kegiatan <i>Workshop</i> Pemberdayaan Komite Sekolah dan Masyarakat.....	69
9. Kegiatan <i>Workshop</i> Penyusunan Profil Sekolah.....	71
10. Plang Visi dan Misi Sekolah	72
11. Kondisi Gedung Sekolah Sebelum dan Sesudah Direhabilitasi.....	75
12. Pekarangan Sekolah	76
13. Kebun dan Hasil Perkebunan Siswa	77
14. Kolam Ikan Nila dan Lele	78
15. Tempat Pembuangan Sampah Organik dan Non Organik	80
16. Lahan Sekolah Hasil Sumbangan Masyarakat	81
17. Kondisi dan Lokasi Kantin Sekolah.....	82
18. Kondisi Toilet Sekolah.....	84
19. Sumur Bor dan Pompa Air	85

20. Keran Wudhu dan Keran Cuci Tangan	86
21. Ruang UKS	87
22. Dokter Kecil DN 3 Panggungrejo	88
23. Kondisi Lingkungan Pembelajaran dan Perilaku Warga Sekolah	90
24. Kelompok Aflatoun dan <i>Lifeskill</i> serta Modul Penunjang	91
25. Bimbel Ca-Tung Salah Satu Kegiatan Di Luar Sekolah	92
26. Ketua OSIS dan Struktur Kepengurusan OSIS	92
27. Kegiatan <i>Mapping</i> Isu Kekerasan Terhadap Anak	96
28. Kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi <i>International Organization Of Childfund</i>	100

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak dan kewajiban ikut serta membangun negara. Anak merupakan subjek dan objek pembangunan nasional Indonesia dalam usaha mencapai aspirasi Bangsa Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur baik secara spiritual maupun materil. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Baik anak dan orang dewasa dapat tumbuh dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal jauh dari ketakutan akan kekerasan. Maka penting dan perlu adanya pemberdayaan terhadap anak, dengan tujuan agar tiap individu anak dapat mengembangkan kepribadian, menggali potensi dan menumbuhkan kepercayaan diri yang baik.

Mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, maka sudah selayaknya negara melindungi dan menjaga generasi mudanya dari hal-hal buruk yang kemungkinan akan terjadi. Negara berkewajiban memenuhi

hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Tidak terpenuhinya hak anak akan menurunkan kualitas hidup anak dan pada akhirnya akan menimbulkan masalah bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

Jika kita menelaah persoalan yang terjadi di lingkungan sosial anak, maka akan banyak timbul keprihatinan yang mendalam. Banyak anak-anak yang harus menanggung resiko akibat kelalaian maupun ketidak mampuan orang dewasa dan orang tua khususnya dalam melindungi anak. Hak-hak mendasar anak seringkali diabaikan dan tidak terpenuhi, seperti akses pendidikan, perlindungan atas kekerasan, seksual dan psikis.

Menurut data kasus berdasarkan klaster perlindungan anak KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), terdapat 22.109 kasus kekerasan terhadap anak dalam kurun waktu 2011 hingga 2016 di Indonesia. Untuk itu, anak memerlukan perlindungan kuat secara hukum. Pemerintah tentunya harus mengambil suatu tindakan sebagai jalan keluar pada kasus kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat setiap tahunnya. Maka kebijakan publik sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan publik sangat dibutuhkan pada kasus ini.

Seperti yang dikatakan Peterson dalam Nugroho (2014;125) bahwa kebijakan publik merupakan *government action to address some problem*. Dapat dipahami bahwa, tindakan yang paling tepat yang harus diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah adalah dengan cara mengeluarkan sebuah kebijakan yang menguntungkan bagi kehidupan bernegara. Pemerintah harus mempertimbangkan

kebijakan apa yang harus dikerjakan, mengapa kebijakan itu harus dilakukan dan apa hasil dari kebijakan tersebut.

Hal mendasar yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka perlindungan anak adalah dengan membuat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sangat lengkap dan sistematis agar anak-anak dilindungi oleh hukum.

Kekerasan terhadap anak terjadi disegala lingkungan pertumbuhan anak, termasuk dilingkungan pendidikan. Sebagian besar waktu dan pertumbuhan anak dibentuk pada fase sekolah. Bukan hanya kekerasan fisik yang sering terjadi dilingkungan sekolah, tetapi juga kekerasan psikis, dan kekerasan seksual.

Bentuk kekerasan fisik yang sering terjadi di lingkungan sekolah yaitu antara lain menjewer, mencubit menendang, memukul dengan tangan, memukul dengan benda, menghukum hingga jatuh sakit seperti pingsan, melukai dengan benda berbahaya. Bentuk kekerasan yang bersifat psikis seperti membandingkan dengan saudara atau anak lain, membentak dengan suara keras dan kasar, menghina dihadapan teman atau orang lain, menyebut “bodoh, pemelas, nakal” dan sebagainya, mencap dengan sebutan jelek atau jahat, pembullying, serta kekerasan dalam bentuk psikis lainnya yang tidak kasat mata. Kemudian kekerasan seksual seperti dicium, diraba, dipeluk, diintip ketika berada di toilet, diperlihatkan foto dan video berbau porno, atau bahkan sampai kekerasan seksual pada tingkatan

pemeriksaan. Pelaku kekerasan di lingkungan sekolah merupakan warga sekolah seperti guru, teman sekolah, atau perangkat lain yang berada di lingkungan sekolah seperti penjaga sekolah, penjaga kantin dan lain sebagainya.

Fenomena tersebut membuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Permen PPPA No 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Kebijakan ini dikeluarkan agar anak merasa aman dan terlindungi dari kekerasan dalam dunia pendidikan. Di dalam Permen PPPA pasal 1 dijelaskan bahwa, Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Di Provinsi Lampung, kasus kekerasan pada anak membuat banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus di bidang pemerhati anak mencoba untuk ikut andil membantu pemerintah dalam upaya pemberdayaan serta perlindungan anak. Di Kabupaten Pringsewu terdapat LSM bernama Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat (L-PAMAS). L-PAMAS berdiri dilatarbelakangi oleh adanya keprihatinan terhadap situasi dan kondisi masyarakat yang mayoritas secara ekonomi masih berkekurangan, sumber daya manusia masyarakat yang masih relative lemah, rendahnya pemahaman tentang kehidupan anak dan

masyarakat yang saling menghormati, mencintai serta penuh penghormatan terhadap hak-hak anak. Selain dari pada itu juga semakin menurunnya tingkat solidaritas, penghargaan, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan antar warga masyarakat.

Menurut Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu, pada tahun 2014 di Kabupaten Pringsewu terdapat 12 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan 1 kasus pembulian, pada tahun 2015 terdapat 8 kasus kekerasan dan pada tahun 2016 terdapat 4 kasus kekerasan yang didampingi oleh LPA. Sedangkan menurut catatan kasus di Polsek Pringsewu terdapat 5 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2015, 1 kasus penganiayaan dan 1 kasus kekerasan seksual pada tahun 2016, dan 1 kasus kekerasan seksual pada tahun 2017. Terhitung 8 kasus kekerasan yang didominasi dengan kekerasan seksual yang terlapor dan ditangani oleh Polsek Pringsewu pada 3 tahun terakhir.

Dalam upaya pemerhati anak dilingkungan pendidikan, L-PAMAS mengimplementasikan program Sekolah Ramah Anak (SRA) dibantu donatur yang merupakan NGO (Non Government Organization) Internasional bernama *ChildFund International*.. Program SRA ini diimplementasikan jauh sebelum Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak dikeluarkan dan disahkan.

L-PAMAS telah mengimplementasikan program SRA sejak tahun 2010 di beberapa Sekolah Dasar yang berada di enam desa binaan L-PAMAS. Desa binaan L-PAMAS merupakan desa yang peduli dan berkomitmen untuk turut

serta dalam mengembangkan program-program yang diselenggarakan oleh L-PAMAS. Enam desa binaan L-PAMAS antara lain yaitu Desa Mataram, Desa Kediri, Desa Karangsari, Desa Way Ngison, Desa Panggungrejo, dan Desa Tanjung anom. Setiap sekolah dasar di enam desa binaan ini menjadi prioritas untuk diterapkan program SRA, akan tetapi hanya ada dua sekolah yang mampu berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan program SRA hingga saat ini, dua sekolah tersebut yaitu SDN 2 Karangsari dan SDN 3 Panggungrejo.

Pada penelitian ini, penulis lebih tertarik memilih lokasi penelitian di SDN 3 Panggungrejo Kecamatan Sukoharjo. Implementasi program SRA di sekolah ini sudah berjalan sejak September 2013. Hal-hal yang menjadi pertimbangan penulis memilih SDN 3 Panggungrejo yaitu lokasi sekolah yang lebih jauh, akses jalan yang rusak dan terpencil dibandingkan dengan SDN 2 Karangsari yang lebih dekat dengan pusat kabupaten kota. Tentunya penulis sadar bahwa dalam pengimplementasian program, kedua sekolah ini memiliki perkembangan yang berbeda namun tetap dengan tujuan yang sama.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sekolah, salah satunya yaitu lingkungan sekolah. SDN 2 Karangsari yang memiliki lingkungan sekolah yang sempit dan dikelilingi pemukiman penduduk tidak mampu meluaskan area sekolahnya agar dapat memanfaatkan lingkungan sebagai sarana belajar. Berbeda dengan SDN 3 Panggungrejo yang terletak dilingkungan yang masih dikelilingi perkebunan, pihak sekolah mampu meluaskan area sekolah dan dapat memanfaatkan lingkungan perkebunan sebagai media pembelajaran bagi siswa.

Lingkungan sekolah dan area sekolah juga yang menjadi daya tarik penulis untuk meneliti di SDN 3 Panggungrejo.

Visi dari SD N 3 Panggungrejo sebagai sekolah yang menerapkan program SRA ialah “Menuju Sekolah Ramah Anak Berbasis Lingkungan dan Budaya”. Visi dari sekolah tentunya didukung dengan misi yang jelas, SD N 3 Panggungrejo memiliki 3 misi utama antara lain yang pertama yaitu memberikan hak-hak dan perlindungan anak sesuai perkembangannya agar terhindar dari kekerasan terhadap anak, serta memberikan rasa aman dan nyaman. Kedua, melaksanakan proses pembelajaran aktif dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai alat pembelajaran. Ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan nilai budaya lokal sebagai sarana dan prasarana pengembangan bakat serta menggali sumber daya peserta didik.

Tujuan dari SD N 3 Panggurejo sebagai Sekolah Ramah Anak ialah terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik, pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sarana pembelajaran bagi peserta didik, dan meningkatnya mutu sekolah dan kinerja guru sebagai teladan bagi peserta didik secara berkelanjutan. Serta target atau tujuan jangka pendek dari sekolah ini ialah menjadi sekolah percontohan di tingkat regional pada tahun 2017, menjadi sekolah ramah anak berbasis lingkungan dan budaya, dan meningkatkan prestasi olahraga khususnya atletik di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Program Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Pringsewu ini merupakan program SRA pertama yang diimplementasikan di Provinsi Lampung. Implementasi program ini termasuk kedalam implementasi yang menggunakan pendekatan

Buttom Up. Pendekatan *Buttom Up* merupakan pendekatan yang menggunakan logika berfikir dari ‘bawah ke atas’, dengan aktor utamanya ialah *street level bureaucrat*. SRA merupakan program yang dicanangkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang merupakan bagian dari *street level bureaucrat*. Sehingga penelitian ini nantinya dapat menggunakan model implementasi yang menggunakan pendekatan *Buttom Up*.

Beberapa hal yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi program SRA, siapa saja yang terlibat, bagaimana tingkat partisipasi pihak yang terlibat, serta sejauh apa program ini telah berjalan selama 3 tahun diimplementasikan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penelitian ini belum pernah dilakukan oleh para peneliti dahulu, sehingga penulis memilih judul penelitian: “Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Penanggulangan Kekerasan Pada Anak (Studi pada SDN 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Penanggulangan Kekerasan Pada Anak di SDN 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Penanggulangan Kekerasan Pada Anak di SDN 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsi implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Penanggulangan Kekerasan Pada Anak di SDN 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Penanggulangan Kekerasan Pada Anak di SDN 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam pembahasan mengenai kebijakan publik, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti dan pihak lain yang tertarik dengan penelitian ini.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi pelaksana program Sekolah Ramah Anak, masyarakat, pemerintah, dan akademika agar dapat ikut serta dalam peningkatan kualitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dunn dalam Syafiie (2006:106), mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan seperti pertahanan keamanan energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, dan perkotaan. Sedangkan menurut Anderson dalam Subarsono (2013:2), kebijakan publik merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Thomas Dye dalam subarsono (2013:2), menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, definisi tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Dewey dalam Parson (2014:8), Kebijakan publik menitikberatkan pada “publik dan problem-problemnya” atau “bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*anaction*) pemerintah”.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, kebijakan publik merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan publik guna memenuhi kebutuhan publik yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut Wahab (2012:17), kebijakan publik memiliki ciri-ciri antara lain:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mempengaruhi pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.
- b. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan berangkat bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif dan negatif.

3. Tahapan Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn dalam Nugroho (2014: 269) adalah sebagai berikut:

- a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Setelah itu Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin

tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Tahap adopsi kebijakan

Alternatif kebijakan yang banyak ditawarkan oleh para perumus kebijakan tadi, Akhirnya dari sekian banyaknya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administratif maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya

finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Tahap evaluasi kebijakan merupakan tahap dimana kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan yaitu guna memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

B. Tinjauan Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Jones dalam Sahya (1996:300) Implementasi melibatkan seperangkat instruksi politik dan saling berhubungan dengan para pelaku. Sedangkan menurut Wahab dalam Sahya (1997:59), “Implementasi kebijakan publik merupakan aspek yang penting dari proses kebijakan”.

Agar dapat menilai apakah suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil atau gagal, dilakukan berbagai upaya untuk mempelajari sebab dan akibat keberhasilan atau kegagalan kebijakan pemerintah melalui pembahasan mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Menurut Silalahi dalam Sahya (1989:148) implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu

kebijakan dirumuskan. Implementasi melibatkan usaha dari *policy* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky sebut sebagai “*Street Level Bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran atau *target group* (Subarsono, 2013;88).

Maka, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, implementasi merupakan aspek utama dalam proses kebijakan publik dan memiliki peran yang penting terhadap keberhasilan dari kebijakan publik. Implementasi juga merupakan tahap yang menentukan dalam proses kebijakan, karena tanpa implementasi yang efektif maka sebuah kebijakan tidak dapat dikatakan berhasil.

2. Model implementasi kebijakan

Sejarah perkembangan implementasi kebijakan, terdapat dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni pendekatan *Top-Down* dan *Bottom Up*. Pendekatan yang bersifat *top-down* dipakai untuk mengklasifikasikan para peneliti yang menggunakan logika berfikir dari ‘atas’ kemudian melakukan pemetaan ‘ke bawah’ untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Menurut Nugroho (2014;680) model “*top-downer*” mudahnya ialah berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Sedangkan pendekatan *bottom-up* menggunakan logika berfikir dari ‘bawah ke atas’ dan menekankan pentingnya memperhatikan dua aspek penting dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu birokrat pada level bawah (*street level bureaucrat*), dan kelompok sasaran kebijakan. Model “*bottom-upper*” bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaan oleh rakyat.

Berikut beberapa model implementasi kebijakan dari beberapa para ahli:

2.1 Model Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2013:99), terdapat 5 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

a. Standar dan sasaran kebijakan.

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

b. Sumber daya

Implementasi kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*human non-resources*).

c. Hubungan antar organisasi

Implementasi sebuah program perlu didukung oleh koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

d. Karakteristik agen pelaksana

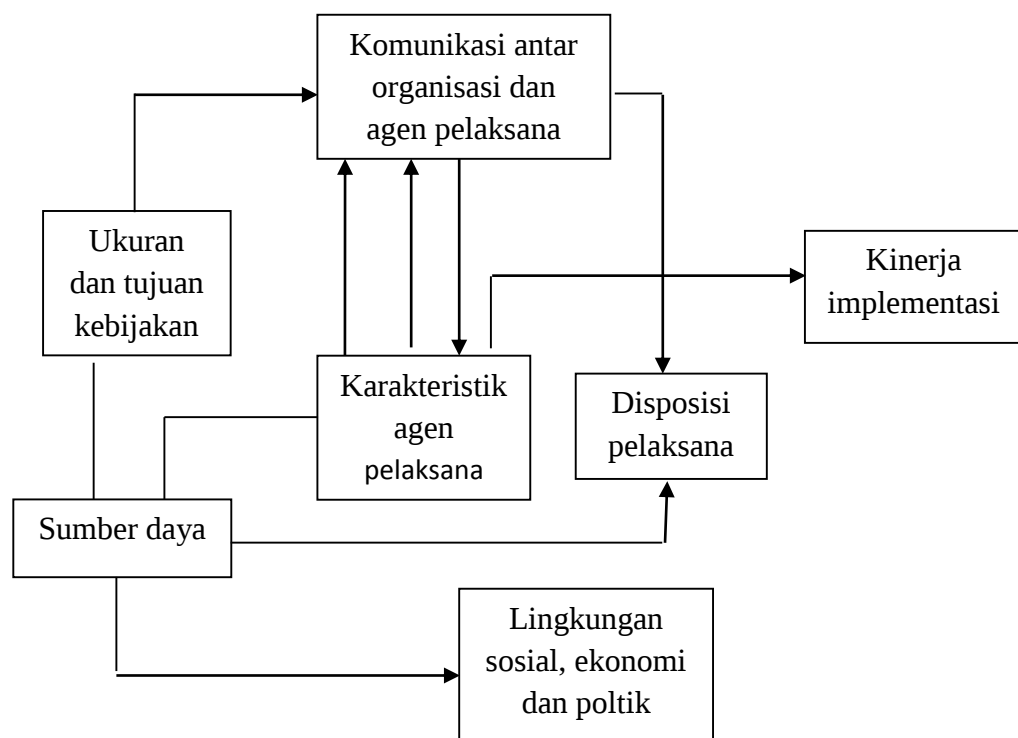
Agen pelaksana mencakup birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi.

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

f. Disposisi implementor.

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting yaitu, (1) respon implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, (2) kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan, dan (3) intensitas disposisi implementator, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.



Gambar 1. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter Dan Van Horn.

Sumber: Van Meter Van Horn dalam Subarsono (2013:100)

2.2 Model Edwards III

Menurut Edwards dalam (Subarsono 2013:90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu :

a. Komunikasi

Agar dapat menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu kelompok sasaran juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Hal ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran.

b. Faktor sumber daya

Tanpa sumber daya yang memadai, tentunya implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya dapat berupa sumberdaya manusia, yaitu kompetensi implementator dan sumber daya finansial.

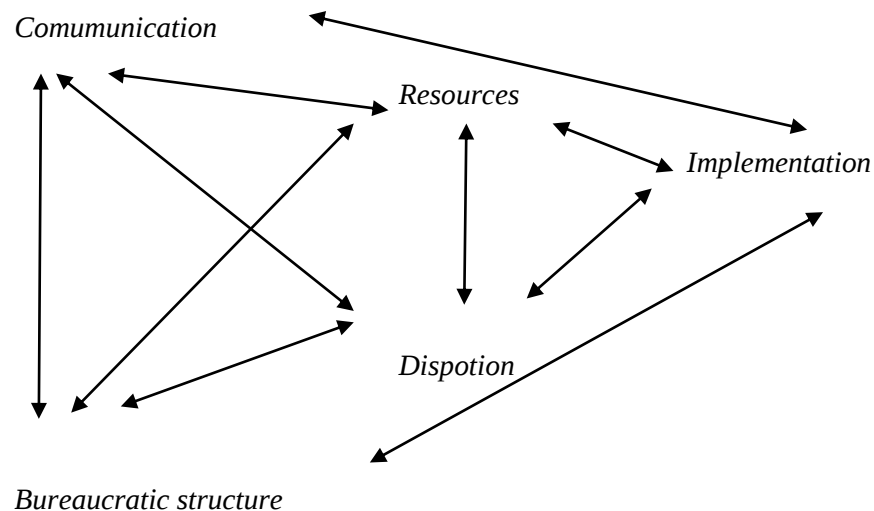
c. Faktor disposisi

Disposisi yang dimaksud adalah watak dan karakter yang dimiliki implementator, seperti kejujuran dan komitmen. Disposisi implementator menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik, sebagaimana diharapkan oleh pembuat kebijakan.

d. Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan. Birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi

kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan *standard operational procedure* (SOP). Sebagai pedoman bagi setiap implementator kebijakan.



Gambar 2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III

Sumber: Edward III dalam Subarsono (2013:91)

2.3 Model Mazmanian dan Sabastier

Menurut Mazmanian dan Sabastier dalam Subarsono (2013:94), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu :

a. Mudah tidaknya masalah dikendalikan (*tractability of the problem*)

Kategori *tractability of the problem* mencakup variabel-variabel yang disebutkan oleh Subarsono (2013:95) : (1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan (2) tingkat kemajemukan kelompok sasaran (3) proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi (4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

b. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasi proses implementasi (*ability of statue to structure implementation*). Kategori *ability of statue to structure implementation* mencakup variabel-variabel antara lain : (1) menjelaskan isu kebijakan (2) seberapa jauh kebijakantersebut memiliki dukungan teoritis (3) besarnya alokasi sumberdaya fianansial terhadap kebijakan tersebut (4) seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar instansi pelaksana (5) kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana (6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan (7) seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

c. Variabel di luar kebijakan

Kategori *nonstatutory variables affecting implementation* mencakup variabel yang terdiri dari : (1) kondisi sosial masyarakat dan tingkat kemajuan ekonomi (2) Dukungan publik terhadap kebijakan (3) sikap dari kelompok pemilih (4) Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementator”.

2.4 Model Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2013:93), terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Isi kebijakan mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan (2) jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan (4) apakah letak sebuah program sudah tepat (5) apakah sebuah kebijakan menyebut implementator dengan rinci dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan

implementasi mencakup : (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

2.5 Model Hoogwood dan Gun

Menurut Hoogwood dan Gun dalam Nugroho (2014;668) , untuk melakukan implementasi kebijakan memerlukan beberapa syarat. Syarat yang pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar. Syarat yang kedua adalah apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu. Syarat ketiga, apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Syarat keempat yaitu apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal. Syarat kelima, seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Syarat keenam apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Syarat ketujuh adalah pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Syarat kedelapan adalah bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Model ini mendasarkan kepada konsep manajemen strategi yang mengarah kepada praktek manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok.

2.6 Model Goggin dkk

Model ini dikembangkan oleh Malcolm Goggin, Ann Bowman, dan James Lester. Menurut Goggin dkk dalam Nugroho (2014;670), mereka bertujuan

mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” dengan adanya variabel *independen*, *intervening*, dan *dependen* dan meletakkan faktor “komunikasi” sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

2.7 Model Richard Elmore dkk

Model ini dikembangkan oleh Richard Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), serta Benny Hjern dan David O’Porter (1981). Menurut Elmore dkk dalam Nugroho (2014;672), model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat di dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model implementasi ini didasarkan kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di tataran rendah. Karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yaang menjadi target atau kliennya dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM). Elmore dalam Golembiewski (1997:766-769) mengatakan bahwa ada empat hal utama yang membuat implementasi kebijakan efektif, yaitu :

1. *Clearly specified tasks and objectives that accurately reflect the intent of policy*
(tugas dan tujuan yang jelas yang secara akurat merefleksikan maksud dari suatu kebijakan)

Implementasi kebijakan yang dalam hal ini terdiri dari satu set rincian dari tujuan pelaksanaan suatu kebijakan yang secara akurat mencerminkan maksud dari kebijakan tertentu, memberikan tanggung jawab dan standar kinerja kepada unit yang dapat melaksanakannya secara konsisten dengan tujuan dari kebijakan tersebut. Tugas dan tujuan organisasi pelaksana diasumsikan sebagai unit yang beroperasi dalam pelaksanaan kebijakan sebagai unit yang memiliki tugas dan tujuan yang jelas yang digunakan untuk mengatur semua tugas dan tujuannya. Kegagalan dalam implementasi kebijakan sering dikaitkan dengan manajemen yang buruk. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu bahwasanya kegagalan dalam pelaksanaan suatu kebijakan disebabkan dari ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang terhadap hasil yang ingin dicapai dalam suatu kebijakan tersebut. Serta adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas kinerja yang mereka lakukan. Manajemen yang baik tentu saja adalah kebalikan dari semua hal di atas. Manajemen ini dimulai dari asumsi normatif bahwa manajemen yang efektif adalah yang melaksanakan tujuan yang diarahkan.

2. *A management plan that allocates tasks and performance standards to subunits*
(manajemen rencana yang mengalokasikan tugas dan standar kinerja ke organisasi pelaksana)

Manajemen perencanaan merupakan proses dimana perencanaan dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya yang diperoleh, tugas, standar kinerja dapat digunakan dan berjalan secara efektif dan efisien dalam melaksanakan suatu kebijakan. Selain itu didalam manajemen perencanaan terdapat

pengendalian operasional yang dilakukan sebagai proses untuk meyakinkan bahwa tugas-tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan dilakukan melalui proses perencanaan dalam mengalokasikan tugas dan standar kinerja. Manajemen perencanaan dan pengendalian di dalamnya memberikan pernyataan singkat tentang transisi dari kebijakan untuk operasi. Perencanaan strategis ini adalah sebagai proses untuk menentukan tujuan, sumber daya yang digunakan dalam mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Selanjutnya Fungsi ini kemudian didistribusikan dalam urutan dari yang tertinggi sampai tingkat terendah dalam organisasi. Secara bersama-sama mereka menggambarkan aturan umum keputusan untuk alokasi sumber daya yang optimal, tugas, dan standar kinerja organisasi pelaksana.

3. *An objective means of measuring subunit performance* (pengukuran kinerja organisasi pelaksana yang dinilai dengan tujuan yang ingin dicapai)

Pengukuran kinerja dilakukan dengan melihat konsistensi organisasi pelaksana kebijakan dengan tujuan dari program tersebut, namun dalam pelaksanaannya proses ini dapat bersifat dinamis, tidak statis, lingkungan terus memaksakan tuntutan baru yang membutuhkan penyesuaian internal apabila terjadi yang demikian dapat dibuat toleransi sebagai penyesuaian internal demi untuk mencapai tujuan kebijakan. Tetapi implementasi tetap selalu diarahkan untuk memaksimalkan tujuan dan nilai akhir yang diinginkan. Keberhasilan atau kegagalan organisasi pelaksana dapat dinilai dengan mengamati perbedaan

antara deklarasi kebijakan dengan perilaku organisasi pelaksana yang meliputi fokus pada kejelasan, presisi, kelengkapan dan kewajaran antara isi deklarasi kebijakan dengan hasil akhir kebijakan.

4. *A system of management controls and social sanctions sufficient to hold subordinates accountable for their performance* (sistem manajemen kontrol dan sanksi sosial untuk menjaga bawahan agar tetap akuntabel)

Implementasi sebagai proses kontrol administratif. Definisi ini berangkat dari asumsi serta kecenderungan umum bahwa organisasi pelaksana yang paling banyak terlibat dalam proses implementasi. Agen-agen pelaksana tersebut sangat mungkin membuat kesalahan ketika melakukan interpretasi atas kebijakan dan menerjemahkannya ke dalam berbagai program dan proyek, yang biasanya selalu disertai bias kepentingan, ideologi, dan kerangka acuan. Berdasarkan hal tersebut, karenanya keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh tingkat penegakan kontrol atas organisasi pelaksana serta dilengkapi dengan arahan dan aturan yang jelas untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan.

Manajemen kontrol yang kuat menunjukkan bahwa organisasi telah mendekati nilai ideal dalam artian dapat memaksimalkan kinerja dari unit organisasi. Kinerja yang demikian dinilai dalam hal pencapaian, yakni adanya kesesuaian hasil target dengan standar kebijakan. Dalam prakteknya, biasa disebut sebagai kriteria kinerja yang cenderung untuk melihat lebih sebagai kesesuaian dengan standar kebijakan yang pada akhirnya dapat mencapai hasil yang memuaskan.

Guna mengidentifikasi hal-hal yang dapat membuat implementasi kebijakan efektif di atas, Elmore juga telah mengidentifikasi beberapa faktor penyebab terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan diantaranya penyimpangan dari perencanaan, spesifikasi, dan kontrol. Artinya keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh perencanaan yang dibuat dan manajemen yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari beberapa model implementasi yang berbeda-beda diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua model pendekatan yaitu model *top down* dan model *bottom up*. Menurut Erwan (2015:37) Pendekatan yang bersifat *top-down* dipakai untuk mengklasifikasikan para peneliti yang menggunakan logika berfikir dari ‘atas’ kemudian melakukan pemetaan ‘ke bawah’ untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Sedangkan pendekatan *bottom-up* menggunakan logika berfikir dari ‘bawah ke atas’ dan menekankan pentingnya memperhatikan dua aspek penting dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu birokrat pada level bawah (*street level bureaucrat*), dan kelompok sasaran kebijakan.

Model yang dikemukakan oleh Elmore, dkk. merupakan model yang digunakan menjadi alat analisis dalam penelitian ini yaitu tentang implementasi program Sekolah Ramah Anak. Peneliti memilih model ini, karena adanya kesesuaian model implementasi kebijakan yaitu menggunakan pendekatan implementasi *Bottom Up* yang mana implementasi kebijakannya didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun

hanya ditataran rendah (*Street Level Bureaucrat*). Model implementasi ini nantinya dapat digunakan untuk menganalisis implementasi program dalam mencapai hasil akhir yang diinginkan.

C. Tipe Kekerasan Terhadap Anak

Menurut Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat (L-PAMAS), ada dua tipe kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekolah, antara lain yaitu:

1. Kekerasan fisik

Tipe kekerasan ini meliputi kekerasan yang dapat terlihat kasat mata. Kekerasan ini melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh. Kekerasan ini meliputi antara lain:

- a. Dipukul dengan tangan maupun dipukul dengan benda, dijewer, disabet, dipecut, ditendang, ditampar, dijambak, dilempar batu, dicubit.
- b. Kerja paksa, diberi pekerjaan yang membahayakan, menghukum hingga jatuh sakit, dan eksploitasi anak.
- c. Berkelahi, dikeroyok, dan tawuran.
- d. Kekerasan seksual, meliputi dipeluk, dicium, dicolek, diraba, diintip ketika berada di toilet, ditunjukkan foto maupun video porno, dijuluki panggilan seksualitas seperti seks, dan bentuk kekerasan seksualitas lainnya.

2. Kekerasan non fisik

Tipe kekerasan non fisik merupakan tipe kekerasan yang bersifat psikis dan sering tidak kasat mata serta sulit untuk ditelusuri. Tipe kekerasan ini biasanya dalam

bentuk perkataan ataupun melalui pernyataan yang sering tidak disadari banyak orang telah melukai pikiran maupun hati anak-anak. Kekerasan tipe ini antara lain seperti:

- a. Penelantaran anak, diskriminasi atau dibandingkan dengan saudara dan teman.
- b. Dimarah menggunakan kata-kata kasar, dibentak, diancam, diolok-olok, dipalak, dikucilkan, dicaci maki atau dihina, dan dicela.
- c. Korban pergaulan bebas, intimidasi anak oleh teman sebaya, dan intimidasi anak oleh guru.

D. Kerangka Pikir Penelitian

Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena sosial yang diakibatkan oleh banyak faktor. Fenomena ini akan berdampak nyata pada tiap individu anak yang seharusnya dapat mengembangkan kepribadian, menggali potensi dan menumbuhkan kepercayaan diri yang baik tanpa perlu merasa takut dan cemas akan diskriminasi dan tindak kekerasan. Untuk ikut andil dalam perlindungan anak, kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menetapkan Peraturan Menteri PPPA No 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak dalam upaya mengurangi kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah.

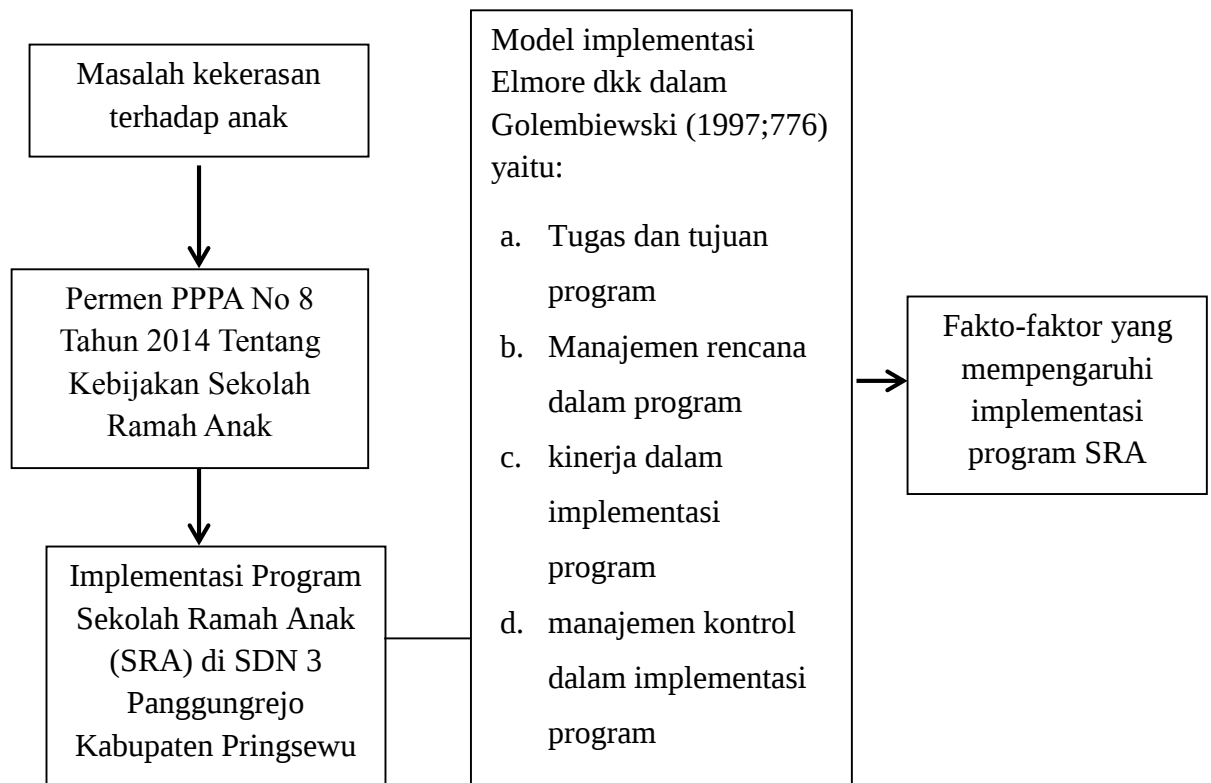
Di Provinsi Lampung, upaya pemerintah dalam melakukan penerapan undang-undang tentang perlindungan anak nampaknya tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat dan juga lembaga-lembaga non pemerintah. Banyaknya kasus kekerasan pada anak membuat banyak Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) yang berfokus di bidang pemerhati anak mencoba untuk ikut andil membantu pemerintah dalam upaya pemberdayaan serta perlindungan anak.

Salah satu LSM bernama L-PAMAS yang berada di Kabupaten Pringsewu, mencoba menerapkan program Sekolah Ramah Anak (SRA) di beberapa sekolah di Kabupaten Pringsewu salah satunya yaitu di SDN 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu. Program Sekolah Ramah Anak (SRA), merupakan program yang berupaya menciptakan lingkungan non kekerasan yang nyaman bagi anak di ranah pendidikan yang juga dilandasi oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Sekolah yang mengimplementasikan program ini merupakan sekolah yang berupaya menciptakan warga sekolah yang peduli terhadap lingkungan hidup, sekaligus mewujudkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan tanggap terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, serta berupaya melakukan penjaminan terhadap adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dalam semua aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab.

Dalam implementasi program ini, peneliti menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh Elmore dkk, karena adanya kesesuaian model implementasi kebijakan yaitu menggunakan pendekatan implementasi *Bottom Up*. Pendekatan *Bottom Up* merupakan pendekatan implementasi yang mana kebijakannya didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya ditataran rendah (*Street Level Bureaucrat*). Model ini dirasa mampu mendeskripsikan dan menggambarkan bagaimana proses

implementasi dan apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi program SRA dengan konkrit dan sederhana.



Gambar 3. Kerangka Pikir
Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2017

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2011:6) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dalam kondisi objek alamiah, yaitu antara individu dengan latar atau fokus penelitiannya tidak diisolasi kedalam bentuk variabel atau hipotesis, karena antara peneliti dengan tempat sia melakukan penelitiannya merupakan satu kesatuan yang utuh. Selain itu, peneliti sendiri menjadi instrumen kunci dalam penelitiannya, karena penelitian itu sendiri bergantung pada pengamatan yang dilakukan peneliti dalam suatu kawasan tersendiri dan hanya peneliti yang mampu berinteraksi dengan orang-orang didalam kawasan tersebut, baik dalam bahasanya maupun didalam peristilahannya.

Pada metode penelitian deskriptif menurut Moleong (2011:11), data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan data-data yang telah dihimpun yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang didapat dari fenomena lapangan yang bersifat empiris guna menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian.

Jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai Implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam penanggulangan kekerasan pada anak (studi kasus SDN3 Panggungrejo) yang masih berjalan hingga saat ini.

B. Fokus penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada proses implementasi dengan menggunakan model implementasi dengan pendekatan *bottom up* yang dikemukakan oleh Richard Elmore dkk, alasan peneliti menggunakan model ini ialah karena program SRA merupakan program yang dilaksanakan LSM lokal yang merupakan bagian dari *street level bureaucrat* sesuai dengan model implementasi dengan pendekatan *bottom up*. Empat variabel utama dari model tersebut adalah:

1. *Clearly specified tasks and objectives that accurately reflect the intent of policy* yakni, tugas dan tujuan yang jelas yang secara akurat merefleksikan maksud dari program SRA di SDN 3 Panggungrejo.
2. *A management plan that allocates tasks and performance standards to subunits* atau manajemen rencana yang mengalokasikan tugas dan standard kinerja ke organisasi pelaksana implementasi program SRA yaitu L-PAMAS sebagai implementor dan SDN 3 Panggungrejo sebagai sasaran implementasi.
3. *An objective means of measuring subunit performance* atau pengukuran kinerja organisasi pelaksana (L-PAMAS dan SDN 3 Panggungrejo) yang dinilai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh program SRA.
4. *A system of management controls and social sanctions sufficient to hold subordinates accountable for their performance* atau sistem manajemen kontrol pada program yang dilakukan langsung oleh L-PAMAS setiap akhir pekan agar dapat menjaga kinerja tetap akuntabel.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Sekolah Ramah Anak di SDN 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Penelitian dilakukan dalam ruang lingkup wilayah SD N 3 Panggungrejo dan lingkup Desa Panggungrejo. Adapun pertimbangan dalam pemilihan lokasi adalah karena SD N 3 Panggungrejo yang berlokasi di Desa Panggungrejo dan merupakan desa binaan dari L-PAMAS yang berkomitmen untuk mengimplementasikan

program SRA. Selain itu, penelitian juga akan dilakukan di L-PAMAS sebagai lembaga yang bermitra dan berkomitmen mengimplementasikan program ini.

D. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian diperoleh dari kunjungan lapangan ke lokasi penelitian oleh peneliti, yakni di desa Panggungrejo dipilih secara *purposive sampling*, yaitu merupakan metode penetapan informan yang dibutuhkan atau dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui tentang implementasi program SRA sehingga mereka akan memberikan informasi secara tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dengan penjelasan tersebut, maka pihak-pihak yang dijadikan informan oleh peneliti diantaranya yaitu dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1 . Daftar Informan

NO	Nama	Jabatan	Tanggal Wawancara
1.	Ahmad Asari, S.Pd	Pimpinan L-PAMAS	20 Februari 2017
2.	Rizal Bahrul Mustofa	Sekretaris LPA	24 Maret 2017
3.	Sumariyam, S.Pd.SD	Kepala SDN 3 Panggungrejo	23 Februari 2017
4.	Yusufudin	Koordinator Program L-PAMAS	20 Februari 2017
5.	Brigpol Siska Indria	Anggota Reskrim Polsek Pringsewu	24 Maret 2017
6.	Miswoto, S.Pd.SD	Wali kelas 5 SDN 3 Panggungrejo	25 Maret 2017
7.	Sumaryono, S.Pd.SD	Wali kelas 6 SDN 3 Panggungrejo	25 Maret 2017
8.	Nur Ahmat	Kepela Pekon Panggungrejo	24 Maret 2017
9.	Defa Fajar Ardian	Ketua OSIS SDN 3 Panggungrejo	25 Maret 2017
10.	Wayan Carlos	Ketua Dokter Kecil SDN 3 Panggungrejo	25 Februari 2017
11.	Sinta	Penjaga kantin SDN 3 Panggungrejo	20 Februari 2017

Sumber: data diolah peneliti tahun 2017

E. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Sumber data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Berupa kata-kata dan tindakan (informan) serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian, melalui wawancara mendalam kepada informan yang telah ditetapkan yang ditulis atau direkam, observasi terhadap peristiwa dan kegiatan yang berlangsung di lapangan, maupun dokumentasi serta catatan lapangan peneliti yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu implementasi program sekolah ramah anak dalam penanggulanagn kekerasan pada anak.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa berita surat kabar, website, artikel, dan referensi-referensi yang menjadi panduan implementasi program SRA. Berikut beberapa data sekunder dalam penelitian ini:

Tabel 2. Daftar Data Sekunder

No	Dokumen	Subtansi
1.	Profil SDN 3 Panggungrejo	Gambaran umum SDN 3 Panggungrejo
2.	Profil L-PAMAS	Gambaran umum L-PAMAS
3.	Profil LPA	Gambaran umum LPA
4.	Permen PPPA No.8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak	Berisi tentang gambaran SRA, indikator SRA, tujuan SRA, prinsip SRA, landasan hukum SRA dan informasi lain berkaitan dengan SRA.
5.	Dokumen progres SDN 3 Panggungrejo	Berisi informasi mengenai kemajuan SDN 3 Panggungrejo setelah menerapkan program SRA.
6.	Dokumen <i>mapping</i> isu kekerasan terhadap anak	Berisi proses dan hasil <i>mapping</i> di SDN 1 Panggungrejo dan SDN 3 Panggungrejo

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2017

F. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah satu pekerjaan dan sangat menentukan dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan cara melakukan sesi tanya jawab dengan tatap muka kepada informan yang telah ditetapkan. Untuk melakukan sesi wawancara, peneliti langsung datang dan tatap muka dengan informan yang telah terpilih dan dirasa mampu memberikan informasi mengenai program SRA.

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengadakan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap suatu objek, dalam hal ini peneliti menggunakan observasi atau

pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan mengenai proses pelaksanaan program SRA. Pengamatan dilakukan terhadap berbagai pihak yang menjalankan dan terlibat dalam implementasi SRA.

3. Dokumentasi

Dokumen yang berkaitan dengan implementasi SRA, serta informasi dalam bentuk surat, foto, maupun berkas lainnya mengenai implementasi SRA yang dilaksanakan di SD N 3 Panggungrejo. Dokumen didapat langsung dari lembaga yang berkaitan dengan program SRA yaitu L-PAMAS dan SDN 3 Panggungrejo serta dari beberapa sumber informan lainnya. Selain itu, beberapa dokumentasi berupa foto didapat langsung oleh peneliti ketika berada di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Nasution dalam Sugiono (2013:336), mengemukakan bahwa analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan penelitian. Menurut Miles dan Hubberman (Ibrahim, 2015:109) bahwa konsep analisis data meliputi kegiatan:

1. Reduksi data, mengumpulkan informasi yang didapat dan menyederhanakan informasi tersebut, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema atau pola dari lapangan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih tajam tentang hasil pengamatan, disamping mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

2. Display data atau penyajian data, menyajikan berbagai informasi dari data yang telah dianalisis sehingga memberikan gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang dilakukan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, merupakan kegiatan analisis data yang dimaksudkan untuk mencari makna dan membuat kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan hipotesis kerja. Pada mulanya kesimpulan tersebut tersebut tentunya masih sangat tentatif, kabur dan diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi yang terus dilakukan selama penelitian berlangsung maka kesimpulan tersebut menjadi lebih mendalam dan akurat.

H. Teknik Keabsahan Data

Setiap penelitian harus memiliki kreditibilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kredibilitas kualitatif adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah. Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) atas keandalan (*realibilitas*). Menurut Moleong (2011: 324) ada beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu;

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Penerapan kriteria derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep *validitas internal* dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat

dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

a. Triangulasi

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain melalui berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan. Adapun triangulasi yang dilakukan dengan tiga macam teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, dan teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan cara :

- 1) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
- 2) mengeceknya dengan berbagai sumber data
- 3) memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data.

Penelitian ini melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yakni dari L-PAMAS, LPA, dan Polsek Pringsewu guna mengetahui tingkat kekerasan terhadap anak dan perkembangan implementasi SRA.

b. Kecukupan referensial

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Kriterium keteralihan berbeda dengan validitas eksternal dari nonkualitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi.

3. Ketergantungan (*Dependability*)

Kebergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya. Kalau proses penelitiannya tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak dependable.

4. Kepastian (*confirmability*)

Penelitian kualitatif ini, uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian (*confirmability*) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian tidak lagi subjektif tapi sudah objektif.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sekolah Ramah Anak

1. Pengertian Sekolah Ramah Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 8 Tahun 2014 pasal 1 dijelaskan bahwa, Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

2. Maksud dan Tujuan Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Maksud dari Kebijakan Sekolah Ramah Anak ialah menjadi acuan bagi pemangku kepentingan termasuk anak dalam mengembangkan Sekolah Ramah Anak sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Sedangkan tujuannya yaitu meliputi dua poin, yang pertama memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak melalui Sekolah Ramah Anak.

Kedua, memastikan bahwa satuan pendidikan mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggungjawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian (lampiran Permen PPPA No 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak).

3. Landasan Hukum Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 8 Tahun 2014, Kebijakan Sekolah Ramah Anak memiliki landasan hukum sebagai berikut.

Ketentuan Internasional meliputi:

- a. Deklarasi Umum mengenai Hak Asasi Manusia pada tahun 1948;
- b. Konvensi Hak Anak oleh PBB tahun 1989;
- c. Deklarasi *Dakar Education For All* (EFA) tahun 2000;
- d. Deklarasi *Millenium Development Goals* (MDGs); dan
- e. Deklarasi *World Fit for Children* tahun 2002.

Ketentuan Nasional meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- j. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
- l. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- m. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- n. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- o. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;

- p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

4. Prinsip Sekolah Ramah Anak

Pengembangan sekolah ramah anak didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Nondiskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik.
- c. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak.
- d. Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah.
- e. Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

5. Tahapan Sekolah Ramah Anak

Masing-masing satuan pendidikan dalam menerapkan sekolah ramah anak harus melaksanakan tahapan-tahapan yang meliputi:

a. Persiapan

- 1) Melakukan sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, bekerjasama dengan Gugus Tugas KLA di provinsi/kabupaten/kota.
- 2) Melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta menyusun rekomendasi dari hasil pemetaan oleh anak.
- 3) Kepala Sekolah/Madrasah, Komite Sekolah/Madrasah, Orang tua/Wali, dan peserta didik berkomitmen untuk mengembangkan SRA, dalam bentuk Kebijakan SRA di masing-masing satuan pendidikan.
- 4) Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah/Madrasah, dan peserta didik untuk membentuk Tim Pelaksana SRA (bagi satuan pendidikan yang telah memiliki Tim antara lain Tim Pelaksana UKS dan/atau Adiwiyata untuk menyesuaikan). Tim ini bertugas untuk mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA, sosialisasi pentingnya SRA, menyusun dan melaksanakan rencana SRA, memantau proses pengembangan SRA, dan evaluasi SRA.
- 5) Tim Pelaksana SRA mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan SRA.

b. Perencanaan

Tim Pelaksana SRA mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada, seperti Usaha Kesehatan Sekolah, Pangan Jajanan Anak Sekolah, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Inklusi, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Sekolah Hebat, Kantin Kejujuran, Madrasah Insan Cendekia, Pesantren Ramah Anak, Bebas Napza, dan lainnya sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan SRA ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mewujudkan SRA.

c. Pelaksanaan

Tim Pelaksana SRA melaksanakan RKAS dengan mengoptimalkan semua sumber daya sekolah, dan bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Di Kabupaten Pringsewu, terdapat dua Sekolah Dasar yang menerapkan program Sekolah Ramah Anak, yaitu SDN 2 Karangsari dan SDN 3 Panggungrejo. Peneliti akan memaparkan gambaran umum SDN 3 Panggungrejo sebagai sekolah yang menerapkan program SRA dan merupakan sekolah yang peneliti pilih untuk menjadi lokasi penelitian. SDN 3 Panggungrejo berada di jalan CPM Suratno Desa Panggungrejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Sekolah ini resmi berdiri pada tahun 1984 dengan akreditasi C dan saat ini dipimpin oleh Ibu Sumariyam, S.Pd.SD selaku kepala sekolah.

Jumlah siswa yang masih menempuh pendidikan di SDN 3 Panggungrejo hingga April 2017 tercatat 180 siswa yang terbagi atas 96 siswa laki-laki dan 84 siswa

perempuan. Sedangkan terdapat 6 tenaga pengajar yang telah berstatus PNS, meliputi 4 orang guru laki-laki dan 2 orang guru perempuan. Selain tenaga pengajar yang telah berstatus PNS, terdapat juga tenaga pengajar non PNS atau honorer yaitu 2 orang guru laki-laki dan 1 orang guru perempuan. Kemudian di SDN 3 Panggungrejo mendapatkan tambahan tenaga pengajar dari program Lampung Mengajar sebanyak 2 orang guru perempuan dan 1 orang guru laki-laki. Sehingga jumlah tenaga pengajar keseluruhan yaitu 12 orang.

Fasilitas gedung yang dimiliki oleh SDN 3 Panggungrejo meliputi, 1 unit kantor guru, 6 unit ruang kelas, 1 unit gedung perpustakaan, 1 unit ruang UKS, 1 unit ruang mushola, 1 unit gudang, dan 9 unit toilet. Luas lahan yang dimiliki sekolah yaitu 4.700 meter persegi yang digunakan sebagai lahan gedung dan lahan pertanian sebagai media belajar siswa. Sarana dan prasarana pendukung lainnya yang dimiliki sekolah yaitu keran cuci tangan, sumur bor, kantin, dan tempat pembuangan sampah.

Visi dari SDN 3 Panggungrejo yaitu menuju sekolah adiwiyata dan ramah anak berbasis agrowisata. Visi tersebut tentunya harus didukung dengan misi yang baik, dalam mewujudkan visi, SDN 3 Panggungrejo memiliki 7 misi utama yaitu yang pertama membiasakan warga sekolah agar disiplin, sopan, santun, ramah dalam bersikap dan berperilaku. Kedua, membiasakan warga sekolah untuk hidup sehat dengan membangun lingkungan yang bersih, indah, rapi, rindang, agamis, aman dan nyaman. Ketiga, menyediakan air bersih yang cukup. Keempat, memberdayakan lingkungan untuk media pembelajaran. Kelima, berupaya menciptakan proses, dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan,

bermakna dan bermutu bagi siswa. Keenam, meningkatkan prestasi akademik dan non akademik peserta didik. Ketujuh, berupaya mewujudkan sekolah yang peduli terhadap lingkungan hidup, berkarakter dan melakukan perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak dalam semua aspek secara terencana dan bertanggungjawab.

Kemudian tujuan dari SDN 3 Panggungrejo yaitu Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik, pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sarana pembelajaran bagi peserta didik dan meningkatnya mutu sekolah dan kinerja guru sebagai teladan bagi peserta didik secara berkelanjutan. Dengan target sekolah yaitu menjadi sekolah percontohan di tingkat regional pada tahun 2016, menjadi sekolah ramah anak berbasis lingkungan dan budaya, meningkatkan prestasi olahraga khususnya atletik di tingkat kecamatan.

Proses dan pelaksanaan pembelajaran di SDN 3 Panggungrejo menggunakan kurikulum KTSP 2006 dan metode Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM) melalui penguatan pada aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara terintegrasi. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan mulai pukul 07:30 WIB sampai dengan pukul 12:00 WIB. Kegiatan pembelajaran disekolah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi diintegrasikan dengan lingkungan dan ramah anak sebagai media pembelajaran.

Pengelolaan pada aspek sikap bagi warga sekolah dituangkan dalam suatu aturan atau tata tertib yang dibuat dan disepakati bersama. Tata tertib ini dirancang khusus tanpa memuat satupun kata “dilarang”. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa mendidik anak tidak harus dilakukan dengan cara “melarang” mereka berbuat

salah. Prinsipnya: Anak boleh saja melakukan kesalahan, tetapi yang paling penting adalah mereka sudah berusaha untuk tidak berbuat salah, dan itu harus dihargai. Inilah pembelajaran yang akan diperoleh melalui penerapan tata tertib ini.

B. Gambaran Umum Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat (L-PAMAS)

Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat (L-PAMAS) merupakan NGO lokal yang berada di Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung. NGO ini resmi berdiri pada tanggal 18 Juni 2007, secara umum dilatarbelakangi oleh adanya keprihatinan terhadap situasi dan kondisi masyarakat yang mayoritas secara ekonomi masih berkekurangan, sumber daya manusia masyarakat yang masih relative lemah, rendahnya pemahaman tentang kehidupan anak dan masyarakat yang saling menghormati, mencintai serta penuh penghormatan terhadap hak-hak anak. Selain dari pada itu juga semakin menurunnya tingkat solidaritas, penghargaan, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan antar warga masyarakat.

Visi L-PAMAS yaitu terwujudnya kondisi masyarakat yang dinamis, sejahtera, mandiri berbasis pada nilai-nilai kehidupan yang luhur. Kemudian misinya yaitu mendorong terwujudnya lingkungan masyarakat yang penuh pengharapan dan penghargaan bagi kedamaian. Dengan mitra kerja L-PAMAS yaitu NGO internasional bernama *Childfund*.

Berdirinya L-PAMAS dilegalitaskan melalui Akta Pendirian Notaris : M. Reza Berawi SH. Nomor 24 tanggal 18 Juni 2007, Akte Perubahan Anggaran Dasar Notaris: M. Reza Berawi SH. Nomor 03 tanggal 04 Januari 2008, Akte Perubahan

Anggaran Dasar Notaris: M. Reza Berawi SH. Nomor 197 tanggal 17 Juni 2013, Surat Tanda Pendaftaran pada Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu nomor : 430/30/D.10/2013 tertanggal 07 Juni 2013, Sertifikat Tanda Bukti Keberadaan Organisasi Masyarakat dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pringsewu nomor : 00-II.03-LT.11/0127/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013., Surat Keterangan Terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung dengan nomor : PEM-903/WPJ.28/KP.0303/2007 dan NPWP : 02.707.139.8-322.000, Surat Tanda Pendaftaran Yayasan/ Badan Sosial pada Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Lampung Nomor : 465/034/Orsos/B.IV/2013, Surat Rekomendasi dari Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Propinsi Lampung No. 037/REK-LKSA/LKKS/V/2013.

Program SRA telah tertuang di profil L-PAMAS dan menjadi program jangka panjang L-PAMAS di bidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam upaya melaksanakan program pendidikan wajib belajar dan ramah anak. Selain itu program SSRA ini juga didukung dengan program jangka L-PAMAS di bidang advokasi anak dan masyarakat. Program advokasi ini bertujuan untuk membantu mengatasi masalah yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak.

C. Gambaran Umum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu

Dalam rangka untuk mengimplementasikan gerakan nasional perlindungan anak yang di canangkan oleh presiden RI pada tanggal 23 juli 1998, maka dibentuklah

lembaga perlindungan anak indonesia dengan SK MENSOS NO. 81/ HUK /1998 Tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dan pada Forum Nasional yang di ikuti oleh LPA Daerah/Provinsi dari seluruh indonesia ke II tahun 2001 di Gedung Pertemuan DEPSOS RI di sepakati menjadi Komisioner dengan nama Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak). LPA Kabupaten Pringsewu resmi berdiri pada tanggal 28 Juni 2007.

Fungsi LPA Pringsewu yaitu antara lain mempengaruhi pembuat keputusan dan praktisi untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar terhadap hak-hak anak, mendorong untuk memberi penghargaan terhadap pandangan anak, meningkatkan kesadaran hak anak pada anak dan orang dewasa, mengupayakan semaksimal mungkin agar anak mempunyai cara yang efektif untuk membela diri ketika haknya dilanggar. LPA juga memiliki tugas tersendiri, tugas LPA yaitu sebagai lembaga pemantau implementasi hak anak, lembaga informasi mengenai permasalahan dan penanganan perlindungan anak, lembaga pengaduan dan rujukan perlindungan anak, lembaga pendidikan dan pelatihan perlindungan anak, lembaga advokasi dan lobby, kemudian sebagai lembaga kajian kebijakan.

Visi LPA Kabupaten Pringsewu sebagai lembaga yang fokus dengan hak-hak anak yaitu terwujudnya kondisi perlindungan anak yang optimum dalam mewujudkan anak yang handal, berkualitas, dan berwawasan menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri, terpenuhi akan hak-haknya, dan bermartabat sebagai anak indonesia, terbangunya kesadaran bahwa demi anak selamatkan bangsa, dan demi bangsa selamatkan NKRI. Kemudian misinya terdiri dari 3 poin yaitu pertama meningkatkan upaya perlindungan anak melalui peningkatan kesadaran,

pengetahuan dan kemampuan masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan yang memberi peluang, dukungan dan kebebasan terhadap mekanisme perlindungan anak. Memberikan pelayanan advokasi hukum dan pendampingan pada anak agar terpenuhi akan hak-haknya. Kedua, membangun jejaring gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus eksploitasi, kekerasan dan trafficking terhadap anak. Dan yang ketiga, membangun kesadaran bahwa demi anak selamatkan bangsa, dan demi bangsa selamatkan NKRI.

Landasan hukum LPA yaitu Konvensi PBB: Tentang Hak Anak / Konvensi Hak Anak (KHA), UU.No.23 th 2002 tentang Perlindungan Anak, UU SPPA No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perlindungan Peradilan Anak, SK Bupati Pringsewu Nomor ; B/127/KPTS/LT.05/2014 Tentang Pengurus Lembaga Perlindungan Anak kabupaten Pringsewu Tahun 2014 – 2018.

D. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu diresmikan pada tanggal 3 April 2009 dengan luas wilayah 534,30 km² dan terletak pada 104⁰ 42¹ 0¹¹ – 105⁰ 8¹ 0¹¹ Bujur Timur serta 5⁰ 8¹ 0¹¹ - 6⁰ 8¹ 0¹¹ Lintang Selatan dengan batas sebelah Utara Kabupaten Lampung Tengah, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus.

Luas wilayah Kabupaten Pringsewu terbagi dalam tiga kategori, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan daerah pegunungan. Luas masing-masing kecamatan di Kabupaten Pringsewu disajikan pada Tabel.

Tabel 3. Luas Daerah, Jumlah Kecamatan, Desa dan Penduduk Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
1.	PRINGSEWU	44,34	13	72,661
2.	GADINGREJO	52,17	23	70,486
3.	PAGELARAN	105,30	22	42,238
4.	SUKOHARJO	63,98	15	48,660
5.	PARDASUKA	90,49	15	34,729
6.	ADILUWIH	56,21	13	35,218
7.	AMBARAWA	24,76	8	35,328
8.	BANYUMAS	32,30	8	21,669
9.	PAGELARAN UTARA	69,75	11	25,119
	Kabupaten Pringsewu	539,30	128	386,108

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu, 2016

E. Gambaran Umum Desa Panggungrejo

Desa Panggungrejo memiliki luas wilayah 338 Hektar dengan jumlah penduduk 2.050 jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 1.031 jiwa, dan perempuan berjumlah 1.019 jiwa. Sebelah utara wilayah desa Panggungrejo berbatasan dengan desa Panggungrejo Utara, Sebelah selatan berbatasan dengan desa Mataram, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Roworejo, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pandansari Selatan.

Jarak yang harus ditempuh dari pusat pemerintahan menuju desa Panggungrejo yaitu dari pemerintah kecamatan berjarak 6km, dari pusat pemerintahan kabupaten berjarak 5km, dan dari pusat pemerintahan provinsi berjarak 57km. Mata pencaharian penduduk didominasi dengan petani dan buruh dengan jumlah persentase mencapai 80%.

Sarana dan prasarana yang dimiliki desa Panggungrejo antara lain yaitu sarana peribadatan dengan kuantitas tiga buah masjid, lima buah mushola, satu buah gereja, dan satu buah pura. Sarana pendidikan yaitu dua buah TK, tiga buah SD, dua buah TPA, satu buah pondok pesantren, dan satu buah SMP. Sedangkan sarana kesehatan yaitu puskesmas dan posyandu.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis implementasi program Sekolah Ramah Anak di SDN 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi program program SRA ini telah terlaksana cukup baik. Dilihat dari persiapan program berupa sosialisasi mengenai SRA kepada sekolah dan pemerintah desa sudah berjalan baik. Serta membangun kerjasama dengan beberapa pihak seperti pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu, dan LPA. Jika dilihat dari tugas, dalam implementasi program SRA tugas dari organisasi dan pihak yang terlibat sudah dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan selaras dengan tujuan dari program SRA yang tercantum dalam Permen PPPA No.8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

Dilihat dari perencanaan program yang diberikan melalui pelatihan-pelatihan *soft skill* guna memberdayakan pendidik dan perangkat pendidik serta masyarakat guna meningkatkan standar kinerja telah diterapkan dengan cukup baik di lingkungan sekolah. Sedangkan pada pelaksanaannya, kinerja organisasi pelaksana sudah baik, sarana prasarana yang di butuhkan SRA hampir terpenuhi, lingkungan sekolah sudah kondusif dan tenaga pendidik sudah cukup memiliki standar kompetensi yang baik.

Kontroling yang dilakukan juga telah memenuhi standar yang tercantum pada Permen PPPA No 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Pengawasan perilaku warga sekolah dilakukan dengan menerapkan tata tertib yang bersifat mengikat telah berjalan dengan baik. Kemudian, kontrol terhadap isu kekerasan yang dilakukan dengan *mapping*, hasilnya tingkat kekerasan di SRA masih tinggi, dan pihak L-PAMAS maupun pihak sekolah belum menemukan metode dan solusi guna menurunkan tingkat kekerasan di SRA. Semua bentuk kontroling berjalan dengan baik.

Pada implementasi program SRA, yang menjadi faktor penghambat di awal program diimplementasikan adalah pihak L-PAMAS kesulitan dalam menyatukan persepsi dan mengajak warga sekolah untuk merubah kebiasaan-kebiasaan serta faktor lainnya yaitu minimnya dana dalam pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Serta akses transportasi yang masih buruk untuk mencapai SDN 3 Panggungrejo.

B. Saran

Setelah melihat dan menganalisis hasil penelitian, maka penulis mencoba memberikan saran, yaitu:

1. Pihak L-PAMAS harus lebih banyak bekerjasama dengan pemerintah dan mensosialisasikan program SRA kepada sekolah tingkat dasar di Kabupaten Pringsewu dengan menjadikan sekolah yang telah berhasil menerapkan SRA sebagai sekolah percontohan.
2. Agar dapat mengurangi tingkat kekerasan anak pada lingkungan sekolah, sebaiknya sekolah sudah memiliki guru bimbingan konseling, mengingat pada

usia anak kekerasan yang sering terjadi di sekolah dianggap wajar karena anak masih dalam fase pertumbuhan dan kekerasan fisik juga dianggap sudah menjadi tradisi dalam mendidik anak-anak.

3. Selain yang menyangkut permasalahan internal sekolah, pemerintah juga seharusnya memperbaiki akses transportasi menuju sekolah, agar tujuan dari sekolah berbasis agrowisata dapat cepat terwujud didukung dengan akses transportasi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Erwan, Agus Purwanto. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Golembiewski, Robert T. 1997. *Public Administration and Public Policy/64*: Marcel Dekker United States Of America.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Ismail. 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan Dan Kinerja*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2014. *Publik Policy*. Jakarta: Kencana Premedia Group.
- Sahya, Anggara. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Media.
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu K. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sumberlainnya:

- <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016> (diakses pada 6 Januari 2017 pukul 15:23).
- Profil SDN 3 Panggungrejo Kabupaten Pringsewu.
- Dokumen Progres Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) SDN 3 Panggungrejo.

Profil Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat (L-PAMAS)

Undang– Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Intruksi Presiden No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti kejahatan Seksual terhadap Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No.8 Tahun 2014.

Dokumen proses dan hasil Mapping SRA di Kabupaten Pringsewu.